

**KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI DALAM POLITISASI BENCANA:
SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS**

***POLITIC AND ECONOMIC INTERESTS OF DISASTER POLITICISATION:
A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW APPROACH***

Arif Budiman^{a,b}, Nur Hidayat^c, Zulhadi^d

^a Program Studi Administrasi Negara FISIPKUM Universitas Serang Raya

^b Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

email: budimankafka22@gmail.com

^c Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro

email: nhsardini@gmail.com

^d Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram

email: zulhadi198867@gmail.com

Abstract

Problem: *Since the study on manipulating disaster issue for political interest has been easy to find, modus dan motives regarding the action are continuing to vary. It ranges from its simplest form to the sophisticated one. In order to keep update of the issue, renewing cognitive aspects of the theme is a must.*

Purpose: *This research is aimed to enhance the study on disaster politicization, expand disaster mitigation strategy, and strengthen disaster risk management.*

Method: *Systematic literature review*

Results: *Disaster politicisation modus operandi can be found on the form of data expose, mass-fear exploitation, lobbying policy makers, risk shifting management, linguistic politics, and public opinion engineering. Along with political interest of maintaining power is economical interest that is to raise the money out of big disaster management project.*

Research Type: *Qualitative*

Keywords: *disaster politicisation, political interest, economical interest*

Abstrak

Masalah: *Kajian tentang pemanfaatan peristiwa bencana untuk kepentingan politik telah banyak dilakukan. Modus dan motif politisasi bencana juga semakin beragam, mulai dari yang paling sederhana dan kasat mata hingga yang canggih dan tak terasa. Jika pemahaman mengenai bentuk-bentuk politisasi bencana ini tidak dibarukan secara berkesinambungan maka kemampuan membaca situasi akan berkurang.*

**Corresponding Author*

email: budimankafka22@gmail.com

Tujuan: Penelitian ini bertujuan memperkaya kajian mengenai politisasi bencana dan memberikan kontribusi bagi penguatan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko bencana

Metodologi: Penelusuran literatur sistematis

Hasil Penelitian: Modus politisasi bencana dapat berupa ekspos data, eksploitasi ketakutan, lobi pengambil keputusan, pengalihan risiko manajemen, politik bahasa, dan penggiringan opini mengenai penyebab bencana. Kepentingan politik yang terkandung di dalamnya dapat berupa kehendak mempertahankan kekuasaan atau mendeligitmasi pemerintahan, sedangkan kepentingan ekonomi yang melekat padanya adalah akumulasi modal melalui inisiatif proyek pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen kebencanaan.

Jenis Penelitian: Kualitatif

Kata Kunci: politisasi bencana, kepentingan politik, kepentingan ekonomi

A. PENDAHULUAN

Bencana sering datang tak terduga. Meski kemajuan teknologi semakin canggih dalam hal deteksi potensi bencana, keterbatasan manusia dalam menerapkan mitigasi dan pencegahan kerap mengakibatkan kerusakan tetap tak terhindarkan. Selain harta benda, bencana sering juga meminta nyawa. Kehilangan salah satu atau keduanya dapat mendatangkan kesedihan dan ancaman bagi masa depan kehidupan, utamanya bagi yang terdampak langsung olehnya. Oleh karena status vitalnya itulah maka siapa saja yang mampu memitigasi risiko bencana secara sistematis, mengendalikan situasi krisis secara efektif, dan memulihkan keadaan dalam waktu cepat akan mendapat tempat di hati para korban. Tidak hanya itu, mereka yang memiliki empati atas kerugian yang diderita para korban pun akan memberikan perhatian dan dukungan.

Dalam konteks kepemimpinan politik dan pemerintahan, para petahana yang terbukti mampu mengelola bencana secara tepat dan bisa mengendalikan keadaan secara singkat berpeluang besar mendapat

dukungan para korban dan siapa saja yang berempati dengannya. Sebaliknya, ketidakmampuannya mengelola keadaan akan dengan mudah mengonversinya menjadi sanksi dan hukuman, baik secara sosial maupun dalam bentuk penarikan dukungan politik.

Selain menjadi momen evaluasi bagi kinerja petahana, bencana juga memberi peluang bagi oposisi dan kandidat independen untuk menawarkan opsi kebijakan alternatif. Kekecewaan pemilih terhadap kinerja petahana yang dianggap kurang optimal dalam menanggulangi bencana membuka kesempatan bagi oposisi untuk merebut simpati dan dukungan pemilih.

Kajian mengenai efek politik dari peristiwa bencana baik yang berfokus pada kandidat maupun yang menitikberatkan pada perilaku pemilih dapat ditemukan di sejumlah tempat. Begitupun dengan perspektif yang digunakan, mulai dari ideologi kandidat (Visconti, 2022), citra personal kandidat (Bechtel & Mananino, 2021), model dan strategi penanggulangan bencana (Fukumoto

dan Kikuta, 2024; Algara, et.al, 2022; Leininger & Schaub, 2023), diskriminasi dan partikularisme dalam pengalokasian bantuan bencana (Cuan, 2015; Kriner & Reeves, 2015; Rivera-Burgos, 2023; Ha, 2024), hingga politik bahasa (Mena, 2023).

Modus-modus politisasi bencana semakin berkembang dan bervariasi seiring waktu. Menghadapi situasi itu diperlukan kajian yang terbaru untuk memperkaya pengetahuan, memelihara kognisi, dan meningkatkan kemampuan membaca situasi dalam rangka menyiapkan mitigasi dan menghindari manipulasi atas setiap peristiwa yang dapat dikategorisasi sebagai bencana.

Penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap fenomena politisasi bencana dan kepentingan politik dan ekonomi yang terkandung di dalamnya melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengannya. Sejumlah artikel dikumpulkan, dianalisa, dan disarikan untuk menemukan modus, motif, dan konsekuensi politik dan ekonomi atas tindakan politisasi bencana. Kajian ini penting dilakukan untuk memperkaya kajian mengenai politisasi bencana dan memberikan kontribusi bagi penguatan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko bencana.

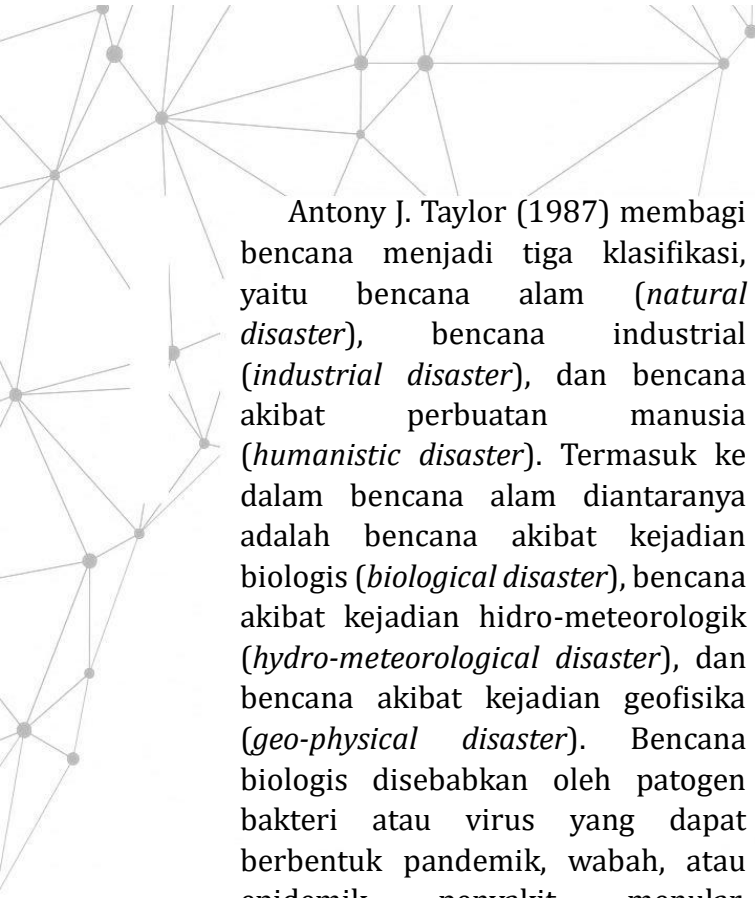
B. TINJAUAN TEORI

Bencana (*disaster*) oleh Gunn (dalam Heryana, 2020) didefinisikan sebagai kehancuran ekologis yang luas baik secara fisik maupun

hubungan fungsional antara manusia dengan lingkungannya, yang disebabkan oleh alam atau manusia, berbentuk kejadian yang serius atau tidak nampak (atau lambat, seperti pada kekeringan), dalam skala yang tidak dapat ditangani oleh sumberdaya yang ada, dan komunitas yang terdampak membutuhkan upaya yang luar biasa untuk menangani kerusakan yang terjadi, bahkan membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional.

Senada dengan Gunn, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (dalam Etkin, 2016) mendefinisikan bencana sebagai suatu situasi atau kejadian yang membutuhkan kemampuan pemerintah lokal secara luar biasa, membutuhkan bantuan secara nasional dan internasional atau minimal dua lembaga internasional atau kelompok bantuan serta media nasional, regional dan internasional.

Merujuk pada dua definisi di atas, sebuah peristiwa dapat dikategorikan sebagai bencana apabila kerusakan yang diakibatkan olehnya berskala besar sehingga membutuhkan keterlibatan banyak pihak mulai dari pemerintah lokal hingga pemangku kepentingan di level internasional. Lebih lanjut CRED menyusun kriteria bagi sebuah peristiwa untuk bisa diklasifikasi sebagai bencana, yaitu: (a) menimbulkan korban jiwa sebanyak 10 orang atau lebih; (b) mengakibatkan dampak ikutan pada sebanyak 100 orang penduduk atau lebih; (c) membutuhkan penetapan kegawatdaruratan oleh pemerintah; dan (d) memerlukan bantuan internasional.



Antony J. Taylor (1987) membagi bencana menjadi tiga klasifikasi, yaitu bencana alam (*natural disaster*), bencana industrial (*industrial disaster*), dan bencana akibat perbuatan manusia (*humanistic disaster*). Termasuk ke dalam bencana alam diantaranya adalah bencana akibat kejadian biologis (*biological disaster*), bencana akibat kejadian hidro-meteorologik (*hydro-meteorological disaster*), dan bencana akibat kejadian geofisika (*geo-physical disaster*). Bencana biologis disebabkan oleh patogen bakteri atau virus yang dapat berbentuk pandemik, wabah, atau epidemik penyakit menular, sedangkan bencana hidro-meteorologik disebabkan oleh curah hujan yang tinggi seperti banjir atau curah hujan yang rendah seperti kekeringan dan kebakaran. Sementara itu, bencana geofisika disebabkan oleh energi yang dihasilkan dari berbagai kejadian geofisika seperti energi seismik yang menimbulkan gempa dan tsunami, energi vulkanik yang menimbulkan erupsi dan aliran lava gunung berapi, dan energi gravitasi yang mengakibatkan longsoran puing, tanah, dan salju.

Jika bencana alam timbul dari sebuah proses alamiah tanpa campur tangan manusia maka bencana industri bersumber dari 'kecelakaan' yang tidak disengaja dalam suatu proses rekayasa perindustrian. Bencana itu dapat timbul misalnya pada saat penciptaan produk, uji coba alat, atau penerapan teknologi baru yang gagal. Aspek ketidaksengajaan ini yang membedakan bencana industri dari

bencana akibat ulah manusia. Jika yang pertama tidak diniatkan gagal sejak awal maka yang terakhir merupakan peristiwa yang memang sengaja dibuat untuk menjadi bencana. Jika yang pertama tidak didasarkan pada niat jahat maka yang kedua nyata-nyata dimotivasi oleh kehendak untuk merusak.

Pada hakikatnya, bencana lebih merupakan sebuah isu kemanusiaan daripada isu politik. Namun, kejadian yang mestinya bersifat universal dan lintas sektoral ini berubah menjadi peristiwa politik manakala para pihak yang terlibat di dalamnya memanfaatkan peristiwa bencana untuk mengambil keuntungan politik.

Politisasi bahkan sudah terjadi sejak istilah 'bencana' muncul sebagai inisiatif kebijakan. Cuan (2015) dalam penelitian disertasinya mengenai politik kebijakan 'deklarasi bencana nasional' di Amerika Serikat menemukan adanya pengaruh kepentingan politik elektoral dalam penetapan bencana nasional di suatu wilayah. Keputusan presiden untuk menetapkan status bencana sebagai 'bencana nasional' pada sebuah wilayah dan persetujuan gubernur atas penetapan tersebut dipengaruhi oleh pemetaan basis dukungan pemilih di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena status bencana nasional berkonsekuensi pada pengalokasian sumberdaya material yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang dan memobilisasi dukungan politik maka keputusan penetapan status bencana kerap dipengaruhi oleh kondisi wilayah tersebut, yaitu apakah masuk dalam wilayah hijau yang menjadi basis pendukung presiden

ataukah wilayah merah yang menjadi basis pendukung oposisi.

Partikularisme-diskriminatif dalam penanganan bencana ini diperkuat oleh sejumlah hasil riset sejumlah akademisi. Kriner and Reeves (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kepentingan elektoral dan sikap politik partisan terhadap pengambilan keputusan penetapan bencana nasional dan alokasi distribusi bantuan oleh presiden Barack Obama menemukan bahwa pengalokasian bantuan bencana ke suatu wilayah dipengaruhi antara lain oleh kategorisasi status wilayah, yaitu apakah berstatus sebagai wilayah basis pendukung ataukah wilayah basis pesaing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Obama memprioritaskan distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang menjadi basis pendukungnya dan wilayah-wilayah yang dikenal sebagai wilayah abu-abu (*swing states*) daripada wilayah-wilayah yang dikenal sebagai basis politik lawan.

Kondisi serupa juga ditemukan Bechtel and Mannino (2022) yang mendapati bahwa wilayah yang menjadi basis politik pemerintah berkuasa mendapat alokasi bantuan bencana yang lebih besar dibanding wilayah yang nyata-nyata menjadi basis politik pendukung oposisi. Sikap politik partisan dalam pengalokasian bantuan bencana ini memperkuat pendapat yang meyakini bahwa paradigma universalisme dalam pengambilan keputusan kebijakan hampir menjadi sesuatu yang utopis. Bahkan dalam sebuah peristiwa kemanusiaan yang

mestinya meminggirkan kepentingan kelompok politik dan golongan, para politisi yang mengelola kekuasaan terbukti tak bisa meminggirkan sikap politis partikularistik.

Dalam konteks politik kekuasaan, optimalisasi potensi dukungan politik oleh para politisi merupakan sesuatu yang rasional. Eksplorasi sumber-sumber dukungan politik biasa dilakukan para politisi untuk menggali dukungan sebanyak-banyaknya, termasuk dalam hal ini adalah peristiwa bencana. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi para politisi ketika pada saat yang sama berbagai kajian membuktikan ada pengaruh politik retrospektif dalam penanggulangan bencana seperti yang didapati Gasper & Reeves, Healy & Malhotra, Chen, dan Fukumoto & Kikuta.

Gasper & Reeves (2011) dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa seorang presiden atau gubernur yang mengeluarkan penetapan status bencana atas peristiwa cuaca buruk yang mengakibatkan kerusakan berat pada sebuah wilayah mendapatkan keuntungan politik berupa dukungan suara pada penyelenggaraan pemilu setelahnya. Sebaliknya, pemerintah berkuasa yang tidak menetapkan status bencana akan 'dihukum' pemilih dengan cara mengalihkan suaranya kepada kandidat alternatif lain di luar kelompok politik petahana (Healy & Malhotra, 2010).

Menguatkan hasil penelitian Gasper & Reeves, Chen (2013) menemukan fakta bahwa petahana yang mampu mengelola bantuan bencana secara efektif akan mendapatkan manfaat berupa

penguatan basis dukungan tradisionalnya sekaligus pada saat yang sama melemahkan basis dukungan politik kelompok pesaingnya.

Fukumoto & Kikuta (2024) dalam penelitiannya mengenai imbal balik dukungan politik (*retrospective voting*) di Jepang juga mendapati bahwa strategi penanggulangan bencana yang efektif dilakukan oleh pemerintah memberi keuntungan elektoral bagi partai politik yang berkuasa. Keuntungan elektoral itu tidak hanya berasal dari konstituen pendukung tradisional tetapi juga dari kelompok pendukung oposisi yang memutuskan untuk mengalihkan dukungan kepada partai penguasa karena merasa puas atas kinerja yang ditunjukkan pada saat menangani bencana.

Artikel ini bermaksud mengkaji politisasi bencana dalam kaitannya dengan kepentingan elektoral pelaku politik kekuasaan, baik bagi petahana maupun oposisi. Melalui studi literatur, tulisan ini bertujuan mempelajari sumber-sumber pustaka ilmiah yang terkait dengan kajian politisasi bencana hingga diperoleh data dan informasi yang kredibel mengenai motif, pola, hingga tujuannya. Hasil kajian ini nanti dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan mulai dari politisi, kepala pemerintahan, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan pihak lainnya untuk menjaga kualitas demokrasi elektoral dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan bencana yang terjadi.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Review Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review*). Sumber data berupa artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus yang diperoleh dari penelusuran internet dengan kata kunci pada judul artikel berbahasa Inggris '*politicization of disaster*'. Penelusuran artikel tidak dibatasi waktu atau periode publikasi tahun tertentu.

Merujuk pendapat Adrian dkk (dalam Syuryansyah & Habibi, 2023) mengenai tahapan penelitian literatur review, penelitian ini akan dilakukan dengan mengikuti tiga tahapan, yaitu: (1) perencanaan, meliputi perumusan masalah dan penyusunan prosedur penelitian secara terstruktur sesuai dengan konteks penelitian; (2) pelaksanaan, mencakup identifikasi literatur yang relevan, menyaring judul dan abstrak, dan menggali data dari sumber-sumber terpilih; dan (3) penyusunan laporan.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

- RM1: Artikel ilmiah apa saja yang sudah terbit mengenai politisasi bencana?
- RM2: Tahun berapa sajakah artikel-artikel ilmiah tersebut terbit?
- RM3: Siapa sajakah yang sudah pernah menulis artikel ilmiah terkait politisasi bencana?
- RM4: Berasal dari jejaring dan afiliasi manakah para penulis artikel ilmiah tersebut?

- RM5: Negara manakah yang paling banyak menerbitkan artikel mengenai politisasi bencana?
- RM6: Apa sajakah modus politisasi bencana?
- RM7: Apa sajakah motif terjadinya politisasi bencana?
- RM8: Bagaimana modus politisasi bencana dilakukan?
- RM9: Keuntungan politik apa saja yang diperoleh para pelaku politisasi bencana?
- RM10: Adakah kerugian yang diderita dari pelaku politisasi?
- RM11: Adakah keuntungan yang didapat oleh korban politisasi? Jika ada, apa saja bentuknya?

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran tanpa pembatasan waktu terbit tertentu terhadap artikel-artikel ilmiah terkait politisasi bencana pada database Scopus menghasilkan lima artikel yang membahas mengenai politisasi bencana. Rincian artikel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Daftar Artikel Terkait Politisasi Bencana dalam Database Scopus

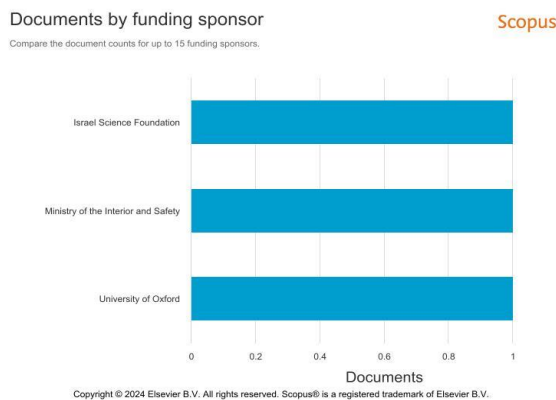
N o.	Penulis	Judul Artikel	Tahun	Nama Jurnal
1.	Broekema, W.	Crisis-Induced Learning and Issue Politicization in the EU: The Braer, Sea Empress	2016	Public Administration

		, Erika, and Prestige Oil Spill Disasters		
2.	Octavianti, T, & Charles, K.	Disaster Capitalism? Examining the Politicization of Land Subsidence Crisis in Pushing Jakarta's Seawall Megaproject	2018	Water Alternatives
3.	Toussaint, M.	Are Bush Fires and Drought 'Natural Disasters'? The Naturalization of Politics and Politicization of Nature in New Caledonia	2019	Anthropological Forum, A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology
4.	Cusumano, N., Siemiatycki, M., & Vecchi, V.	The Politicization of Public-Private Partnerships Following A Mega-Project Disaster: The Case of The Morandi Bridge Collapse	2020	Journal of Economic Policy Reform

5.	Chung, J.B., Choi, E., Kim, L., & Kim, B.J.	Politicization of a Disaster and Victim Blaming : Analysis of The Sewol Ferry Case in Korea	2022	International Journal of Disaster Risk Reduction
----	---	---	------	--

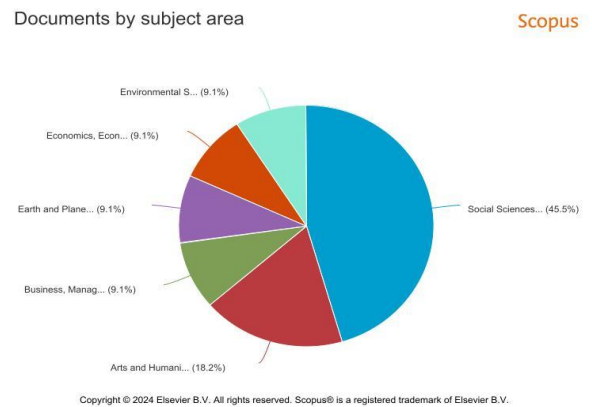
Sementara itu, sumber dana penelitian terkait politisasi bencana dalam konteks penelitian ini tercatat sebanyak tiga pendonor yaitu Israel Science Foundation, Ministry of the Interior and Safety, dan Universitas Oxford.

Gambar 1.
Sumber Dana Penelitian



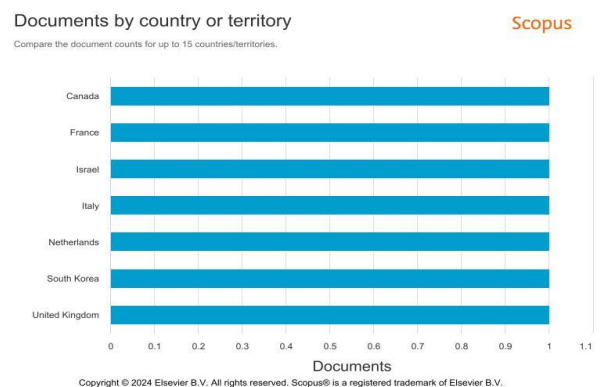
Artikel-artikel tersebut tercakup dalam berbagai wilayah subjek penelitian, yaitu lingkungan hidup, ilmu sosial, ekonomi, ilmu bumi, manajemen bisnis, dan seni dan humaniora.

Gambar 2.
Area Subjek Penelitian



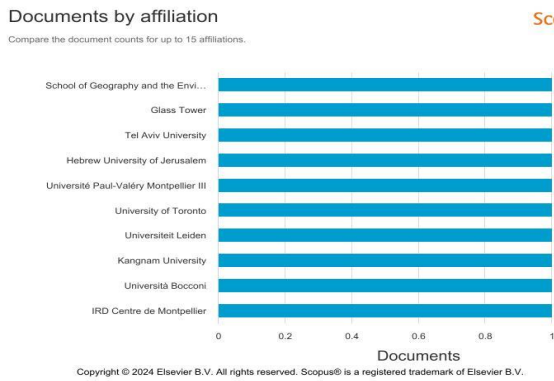
Negara-negara yang turut memberikan kontribusi dalam kajian politisasi bencana dalam konteks penelitian ini adalah Kanada, Perancis, Italia, Belanda, Korea Selatan, dan Inggris.

Gambar 3.
Dokumen Berbasis Negara/Wilayah



Para penulis yang melakukan kajian politisasi bencana dan mempublikannya pada jurnal terindeks scopus terafiliasi ke beragam institusi, diantaranya adalah Universite Paul-Valery Montpellier III, University of Toronto, dan Kangnam University. Rincian lengkap afiliasi para penulis tersebut dapat dilihat pada table berikut:

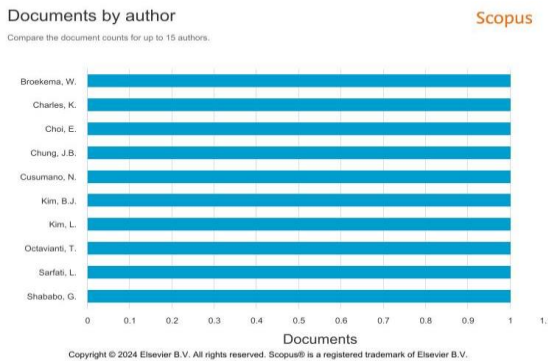
Gambar 4.
Afiliasi Penulis Artikel



Adapun nama-nama penulis yang berkontribusi pada kajian politisasi bencana tersebut secara spesifik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

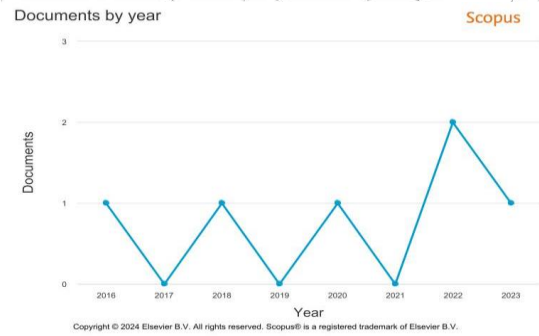
Gambar 5.

Daftar Nama Penulis Artikel



Hasil kajian yang dihasilkan para peneliti tercatat dipublikasikan antara tahun 2016 sampai 2023, dengan kekosongan penerbitan terjadi pada tahun 2017, 2019, dan 2021. Rincian selengkapnya dapat diamati pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.
Jumlah Artikel Berdasarkan Tahun Penerbitan

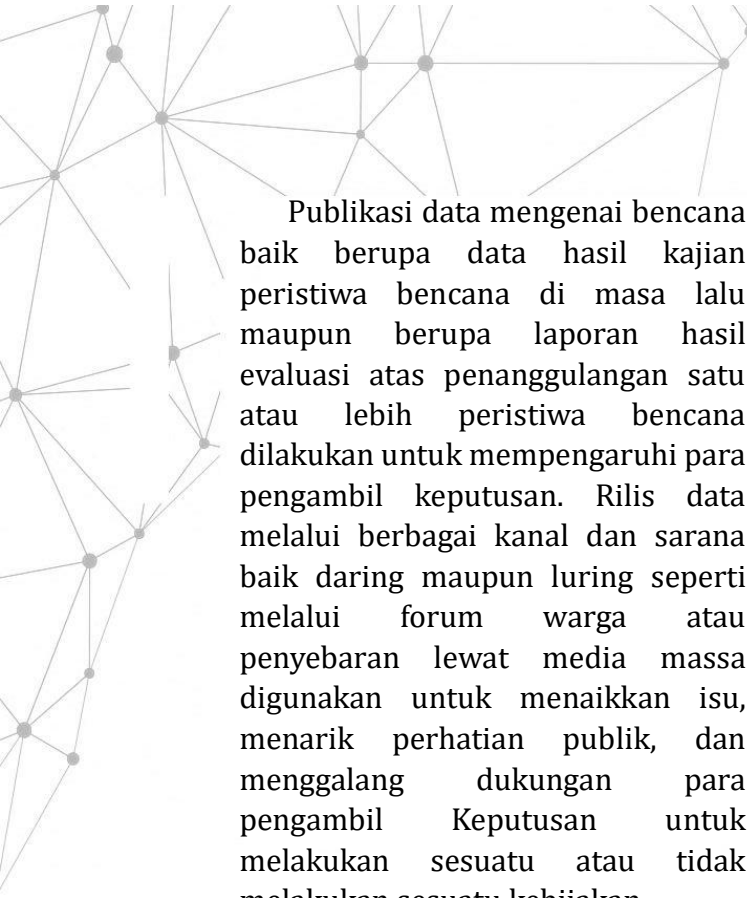


Hasil kajian literatur atas artikel-artikel politisasi bencana sebagaimana disebut di atas menunjukkan bagaimana modus politisasi bencana berlangsung, motif yang terkandung di dalamnya, hingga keuntungan dan kerugian yang diperoleh para pihak yang terkait langsung dalam suatu peristiwa bencana.

Modus Operandi dan Motif Politisasi Bencana

Modus operandi politisasi adalah cara orang per-orang atau kelompok dalam melakukan politisasi. Dalam konteks politisasi bencana maka modus operandi politisasi dapat dimaknai sebagai cara orang per-orang atau kelompok dalam melakukan politisasi atas satu atau lebih peristiwa bencana untuk mencapai tujuan subjektifnya, baik sosial, politik, maupun ekonomi.

Berdasarkan penelusuran literatur atas artikel-artikel mengenai politisasi bencana pada jurnal terindeks scopus diperoleh informasi mengenai modus-modus yang terjadi dalam pembuatan politisasi bencana, yaitu melalui (1) ekspos data; (2) eksploitasi ketakutan; (3) lobi pengambil keputusan; (4) pengalihan risiko manajemen; (5) politik bahasa; dan (6) penggiringan opini mengenai penyebab bencana.



Publikasi data mengenai bencana baik berupa data hasil kajian peristiwa bencana di masa lalu maupun berupa laporan hasil evaluasi atas penanggulangan satu atau lebih peristiwa bencana dilakukan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan. Rilis data melalui berbagai kanal dan sarana baik daring maupun luring seperti melalui forum warga atau penyebaran lewat media massa digunakan untuk menaikkan isu, menarik perhatian publik, dan menggalang dukungan para pengambil Keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kebijakan.

Eksplorasi ketakutan dilakukan dengan cara menggaungkan informasi mengenai adanya potensi bencana. Tindakan ini dilakukan untuk menyebarkan ketakutan di benak warga dan pemukim di sebuah wilayah. Pada kasus di Jakarta misalnya, para pendukung proyek *seawall* menggembor-gemborkan data penurunan tanah di Jakarta untuk menghadirkan ketakutan di benak warga. Tindakan tersebut diharapkan menjadi rasionalisasi atas kebutuhan pembangunan *seawall* di sepanjang 32 kilometer pantai Jakarta dengan luasan mencakup 5100 hektar lahan di sekitarnya.

Selain membangun ketakutan di benak warga, eksploitasi data dan informasi mengenai potensi bencana juga dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk melobi dan meyakinkan para pengambil keputusan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan instrumen tersebut, para pemilik modal baik secara langsung

maupun melalui para agensinya berupaya meyakinkan para pemimpin pemerintahan untuk mau menginisiasi proyek mitigasi dan penanggulangan bencana berskala besar. Tujuannya tidak lain untuk mengakumulasi keuntungan ekonomi di ujungnya.

Modus operandi politisasi bencana lainnya adalah dengan melakukan pengalihan tanggung jawab penanganan bencana kepada pihak lain. Dalam konteks kemitraan negara dan swasta, tugas pemerintah tersebut dialihkan kepada pihak swasta, atau aktor lain di luar negara. Melalui kemitraan itu, pemerintah berusaha memanfaatkan peluang keuntungan yang tersimpan di dalamnya, sekaligus pada saat yang sama menghindari keburukan yang juga melekat padanya. Jika penanganan bencana berhasil maka pemerintah akan mengklaimnya sebagai prestasi, namun jika gagal maka pemerintah dapat menimpakan kesalahan kepada mitra kerja.

Politisasi lainnya adalah melalui politik bahasa. Penggunaan istilah 'bencana' diniatkan untuk menyamakan kepentingan asli para pihak yang berkepentingan dengannya. Salah satu yang dilakukan adalah menyematkan istilah 'bencana' pada suatu peristiwa yang sejatinya merupakan 'rekayasa' manusia. Sebuah peristiwa kerusakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan mengambil keuntungan sosial, ekonomi, politik, dan kependudukan. Sebuah peristiwa kebakaran di salah satu wilayah di New Caledonia misalnya sejatinya dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu untuk tujuan relokasi warga

dan pendudukan lahan. Politik bahasa itu sengaja dibuat untuk mempertahankan citra baik satu pihak dan meminimalisir potensi perlawanan dari lain pihak.

Modus berikutnya adalah menyalahkan korban sebagai penyebab bencana (*blaming the victim mechanism*), sebagai strategi pengalihan atas ketidakmampuan atau kelalaian petugas atau pemerintah yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dengan layanan berkualitas. Modus ini digunakan sebagai pembelaan kepada kelompok politik yang sedang berkuasa oleh para pendukungnya. Tujuannya adalah menjaga citra kinerja pemerintah yang sedang berkuasa dan mencegah oposisi mendeligitimasi kekuasaan pemerintah.

Keuntungan dan Kerugian Politisasi Bencana

Politisasi terhadap produk kebijakan berupa laporan hasil evaluasi penanggulangan bencana misalnya dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi para pengambil keputusan di berbagai cabang kekuasaan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana secara efektif dan tepat guna berdasarkan informasi yang valid dan sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Sementara itu, para pihak yang mengeksploitasi ketakutan warga atas potensi bencana yang akan terjadi berpeluang mendapat keuntungan ekonomi dari proyek pencegahan dan penanggulangan bencana yang akan diinisiasi.

Politisasi dalam suatu relasi kemitraan penanganan bencana

dapat digunakan oleh para politisi dan administrator pemerintahan untuk mengalihkan beban tanggung jawab pekerjaan ke pihak lain, sehingga dengan demikian citra kinerja mereka tetap terjaga dan tidak berubah menjadi cela. Sedangkan keuntungan politik bahasa dalam penyematan istilah 'bencana' terhadap sebuah peristiwa yang sejatinya hasil 'rekayasa manusia' dapat mengurangi risiko sosial, politik, dan ekonomi para pemilik modal dan/atau penguasa atas kemungkinan munculnya kemarahan warga pemukim atau para pemilik lahan yang tinggal di sebuah wilayah.

Selain keuntungan, politisasi bencana juga menyimpan keburukan. Data berupa laporan hasil evaluasi penanggulangan bencana tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal jika para pelaku evaluasi tidak memiliki kompetensi yang memadai dan tidak mempunyai standar moral yang mencukupi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. Validitas data yang bermasalah dapat memperlebar kesenjangan (*gap*) antara kenyataan di lapangan dengan strategi kebijakan yang diusulkan.

Politisasi potensi bencana juga dapat menimbulkan 'kebutuhan semu', yaitu sebuah rekayasa kognitif untuk membentuk persepsi atas sebuah kondisi mengenai kadar urgensi sebuah kebijakan. Kebutuhan semu ini akan mengakibatkan kerugian bagi warga jika misalnya pemerintah harus mengalihkan alokasi anggaran yang semestinya bisa digunakan untuk menyediakan layanan publik dengan manfaat yang

lebih luas namun harus tertunda akibat penetapan prioritas anggaran kebencanaan yang salah.

Sementara itu, politik kategorisasi bahasa dan istilah dapat mengaburkan fakta peristiwa bencana. Hakikat fakta tidak dapat diungkap seterang-terangnya karena karena pelaku kerusakan disembunyikan dibalik kata-kata melalui strategi politik bahasa. Dalam kondisi itu, pelaku kerusakan dapat terus melenggang bebas tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Manajemen kebencanaan sarat akan kepentingan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Modusnya bisa bermacam-macam, mulai dari strategi ekspos data dan informasi hingga penggiringan opini. Sebagian mendatangkan keuntungan, namun politisasi bencana juga berpeluang mengakibatkan kerugian bagi sebagian besar kalangan. Ekspos data dapat membantu para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan bencana sedangkan penggiringan opini dapat menimbulkan kebutuhan semu dan mengaburkan aktor yang mestinya dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa bencana. Untuk itu, pemahaman terhadap selubung permasalahan perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi manipulasi oleh penguasa terhadap warganya, juga oleh para pemilik modal terhadap rakyat biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Bechtel, M. M., & Mannino, M. (2022). *Retrospection, Fairness, and Economic Shocks: How Do Voters*

Judge Policy Responses to Natural Disasters? Political Science Research and Methods 10 (2): 260-278. <https://doi.org/10.1017/psrm.2020.39>.

Broekema, W. (2016). *Crisis-Induced Learning and Issue Politicization in The EU: The Braer, Sea Empress, Erika, and Prestige Oil Spill Disasters*. Public Administration Vol. 94, No. 2, 2016 (381–398)

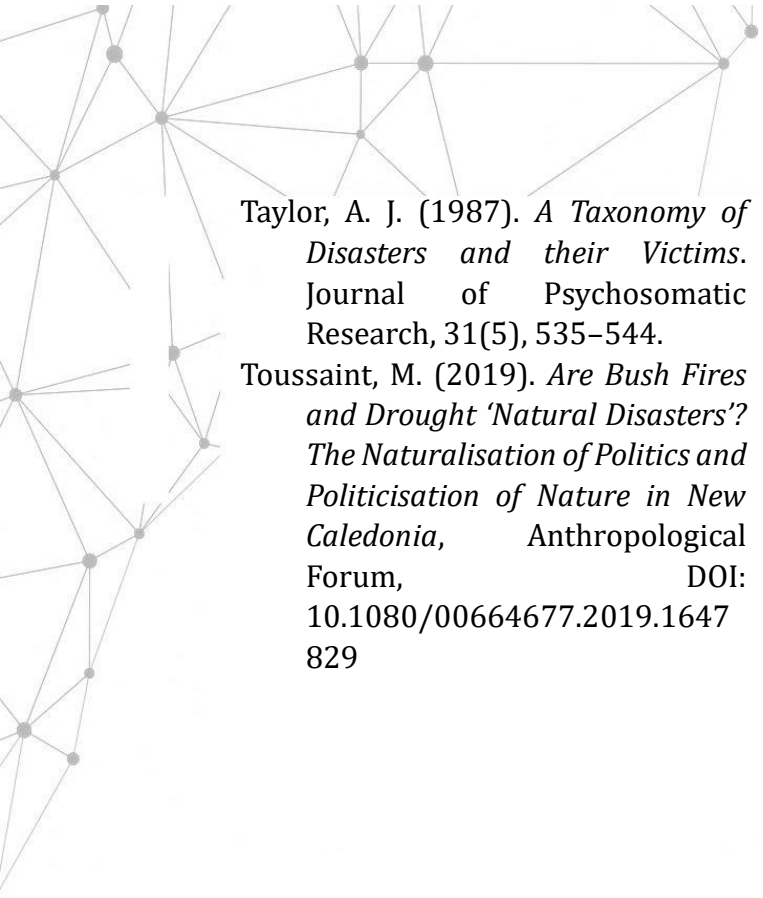
Cuan, S. G. S. (2015). *Assessing The Influence of Politics on California Wildfire Disaster Declaration Decisions at The County Level* (Order No. 1585836). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1668381930). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/assessing-influence-politics-on-california/docview/1668381930/se-2>

Chung, J.B., Choi, E., Kim, L., & Kim, B.J. (2022). *Politicization of a Disaster and Victim Blaming: Analysis of the Sewol Ferry Case in Korea*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 69, <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102742>

Cusumano, N., Siemiatycki, M., & Vecchi, V. (2020): *The Politicization of Public-Private Partnerships Following A Mega-Project Disaster: The Case of The Morandi Bridge Collapse*, Journal of Economic Policy Reform, DOI: 10.1080/17487870.2020.1760101

Etkin, D. (2016). *Disaster Theory: An Interdisciplinary Approach to*

- Concepts and Causes*. Oxford: Elsevier Ltd.
- Fukumoto, K., & Kikuta, K. (2024). *After A Storm Come Votes: Identifying the Effects of Disaster Relief on Electoral Outcomes*. *Journal Political Behavior*, DOI:<https://doi.org/10.1007/s11109-024-09921-1>
- Gunn, S. W. A. (2013). *Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief (2nd ed.)*. New York: Springer.
- Ha, H. (2024). *Three Essays on The Political Economy of Federal Spending* (Order No. 31301406). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (3064088498). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/three-essays-on-political-economy-federal/docview/3064088498/se-2>
- Heryana, A. (2020). *Pengertian dan Jenis Bencana*. Jakarta: Universitas Esa Unggul
- Kriner, D. L., & Reeves, A. (2015). *Presidential Particularism in Disaster Declarations and Military Base Closures*. *Presidential Studies Quarterly*, 45(4), 679-702. DOI:<https://doi.org/10.1111/pdq.12224>
- Leininger, A., & Schaub, M. (2023). *Strategic Alignment in Times of Crisis: Voting at the Dawn of a Global Pandemic*. *Political Behavior*. DOI <https://doi.org/10.1007/s11109-023-09885-8>
- Mena, R. (2023). *Advancing "No Natural Disasters" With Care: Risks and Strategies to Address Disasters as Political Phenomena in Conflict Zones*. *Disaster Prevention and Management*, 32(6), 14-28. doi:<https://doi.org/10.1108/DP-08-2023-0197>
- Octavianti, T., & Charles K. (2018). *Disaster Capitalism? Examining The Politicisation of Land Subsidence Crisis in Pushing Jakarta's Seawall Megaproject*. *Water Alternatives*, 11(2), 394-420.
- Rivera-Burgos, V. (2023). *Language, Skin Tone, And Attitudes Toward Puerto Rico In The Aftermath Of Hurricane Maria*. *The American Political Science Review*, 117(3), 789-804. doi:<https://doi.org/10.1017/S003055422000971>
- Sarfati, L., & Shababo, G. (2023). *The Writing on The Wall: Affective Politicization of The Sewöl Disaster on Facebook*. *Korean Studies*, 47, 214-242. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/writing-on-wall-affective-politicization-sewöl/docview/2886392794/se-2>
- Syuryansyah, & Habibi, F. (2023). *The Role of Local Wisdom in Disaster Mitigation: A Systematic Literatur Review (SLR) Approach*. *International Journal of Disaster Management*, 6(3) 327-344. <https://doi.org/10.24815/ijdm.v6i3.34734>



Taylor, A. J. (1987). *A Taxonomy of Disasters and their Victims*. Journal of Psychosomatic Research, 31(5), 535–544.

Toussaint, M. (2019). *Are Bush Fires and Drought 'Natural Disasters'? The Naturalisation of Politics and Politicisation of Nature in New Caledonia*, Anthropological Forum, DOI: 10.1080/00664677.2019.1647829